

## PERAN STRATEGIS BBPMP DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI PENDIDIKAN DI JAWA TIMUR

**Patrisius Lea Higo Lima<sup>1</sup>, Bambang Kusbandrijo<sup>2</sup>**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[Limaigo413@gmail.com](mailto:Limaigo413@gmail.com), [bambang\\_kusbandrijo@untag-sby.ac.id](mailto:bambang_kusbandrijo@untag-sby.ac.id)

### ABSTRAK

Transformasi pendidikan berbasis digital menjadi agenda global sementara kesenjangan mutu antarwilayah masih tinggi, termasuk di Jawa Timur. BBPMP Jawa Timur bertindak sebagai pengungkit utama pemerataan mutu melalui pendampingan dan digitalisasi layanan. Penelitian pengabdian ini bertujuan menggambarkan kontribusi program magang pada penguatan administrasi kepegawaian BBPMP serta peningkatan kompetensi mahasiswa Administrasi Publik. Kegiatan dilaksanakan sebagai praktik kerja lapangan bertipe participatory job training selama 40 hari (3 Maret–8 Mei 2025) di unit kepegawaian BBPMP. Data diperoleh melalui observasi partisipatif harian, wawancara semi-terstruktur, studi dokumen SIMPEG dan POS, serta logbook aktivitas; validitas dijaga dengan triangulasi sumber-metode, sedangkan analisis menggunakan teknik reduksi-display-verifikasi dan tabulasi frekuensi sederhana. Hasil menunjukkan tercapainya 1.935 arsip terdigitasi, 287 entri SIMPEG terbaru, 43 draf surat kedinasan, tiga rekap absensi bulanan, dan satu POS kepegawaian yang disempurnakan. Mahasiswa menguasai keterampilan teknis aplikasi perkantoran, manajemen data, serta etika birokrasi, sekaligus mempraktikkan nilai integritas dan pelayanan publik. BBPMP memperoleh dukungan kapasitas jangka pendek dan masukan inovatif untuk akselerasi digitalisasi layanan. Magang ini menegaskan peran strategis BBPMP sebagai katalis transformasi pendidikan provinsi dan membuktikan bahwa kemitraan kampus-instansi efektif memperkuat tata kelola kepegawaian.

**Kata kunci :** Transformasi pendidikan, administrasi kepegawaian, magang mahasiswa, digitalisasi birokrasi, BBPMP Jawa Timur

### ABSTRACT

*Digital-based educational transformation has become a global agenda, while disparities in quality across regions remain significant, including in East Java. The East Java Education Quality Assurance Center (BBPMP) plays a pivotal role in promoting equity through mentoring and service digitalization. This community service study aims to describe the contribution of internship programs in strengthening the administrative functions of BBPMP and enhancing the competencies of Public Administration students. The activity was conducted as a participatory job training over 40 working days (March 3–May 8, 2025) within the personnel unit of BBPMP. Data were collected through daily participant observation, semi-structured interviews, document analysis of the SIMPEG system and Standard Operating Procedures (POS), and activity logbooks; data validity was ensured via source and method triangulation, while data were analyzed using descriptive qualitative techniques and simple frequency tabulation. The results show the digitization of 1,935 personnel files, 287 updated SIMPEG entries, 43 official letter drafts, three monthly attendance summaries, and one revised personnel SOP document. Students acquired technical skills in office software, data management, and bureaucratic ethics while applying values of integrity and public service. BBPMP benefited from short-term support capacity and innovative inputs for accelerating digital service transformation. This internship affirms BBPMP's strategic role in regional education reform and demonstrates the effectiveness of campus–government collaboration in strengthening administrative governance.*

**Keywords :** Educational transformation, personnel administration, student internship, digital bureaucracy, BBPMP East Java

## PENDAHULUAN

Menurut UNESCO, transformasi pendidikan berbasis digital saat ini menjadi isu strategis di seluruh dunia karena dipandang sebagai katalis utama pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4 (SDG 4) mengenai pendidikan berkualitas (UNESCO, 2024). Laporan UNESCO SDG 4 Scorecard tahun 2024 menunjukkan bahwa percepatan adopsi teknologi mampu memangkas kesenjangan akses belajar lintas wilayah dan kelompok sosial dengan signifikan (UNESCO, 2024). Di sisi lain, World Bank Digital Progress Report 2024 menegaskan bahwa jarak digital—khususnya di negara berpendapatan menengah—berpotensi memperluas jurang pembangunan jika ekosistem pendidikan tidak segera bertransformasi (World Bank, 2024). Fenomena tersebut memaksa pemerintah, industri, dan masyarakat sipil di seluruh belahan dunia untuk mencari model kolaborasi yang lebih inklusif demi memastikan setiap anak memperoleh pembelajaran bermakna di era ekonomi berbasis pengetahuan (World Bank, 2024). Praktik baik sejumlah negara menunjukkan bahwa reformasi kurikulum, peningkatan kompetensi guru, dan digitalisasi manajemen sekolah menjadi tiga pilar kunci akselerasi mutu pendidikan global (UNESCO, 2024).

Namun kemajuan ini tidak terjadi secara merata; World Bank mencatat 2,4 miliar penduduk dunia masih terhambat keterjangkauan perangkat dan koneksi internet kualitas tinggi (World Bank, 2024). Situasi ketimpangan tersebut menjadikan penguatan kapasitas lembaga penjamin mutu pendidikan kian mendesak di tingkat nasional dan sub-nasional, termasuk di Indonesia (World Bank, 2024). Pada tataran nasional, Indonesia menempatkan transformasi digital pendidikan sebagai agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dengan target pemerataan akses dan peningkatan literasi digital di seluruh jenjang (Bappenas, 2020). Kebijakan Merdeka Belajar yang digagas Kemendikbudristek memfokuskan perubahan paradigma pembelajaran menjadi lebih kontekstual, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik.

Di tingkat nasional, Indonesia sedang berada pada masa transisi penting dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional. Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), telah meluncurkan berbagai kebijakan progresif, salah satunya Merdeka Belajar yang menekankan fleksibilitas pembelajaran, otonomi satuan pendidikan, dan penguatan peran guru sebagai fasilitator. Implementasi kebijakan ini tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan sistem yang mampu menjamin mutu pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, restrukturisasi kelembagaan melalui pendirian Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) menjadi langkah strategis untuk memperkuat fungsi penjaminan mutu pendidikan di daerah.

Implementasi kebijakan tersebut diperkuat melalui jaringan Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BB/BPMP) yang direstrukturisasi berdasarkan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPMP (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021). Lembaga ini diberi mandat melakukan pemetaan mutu, pendampingan kurikulum, supervisi, dan pengembangan sistem informasi rapor pendidikan sebagai fondasi pengambilan keputusan berbasis data (BBPMP Jatim, 2023). Kemendikbudristek bahkan menambah alokasi belanja pendidikan Rp 81,78 triliun pada 2024 untuk melanjutkan intervensi digitalisasi sekolah, guru penggerak, dan Program Sekolah Penggerak—semuanya memerlukan koordinasi erat dengan BBPMP (BBPMP Jatim,

2023). Dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat (PkM), perguruan tinggi diharapkan bermitra dengan BBPMP guna memastikan riset terapan, pelatihan, serta model-model inovatif pembelajaran digital dapat diterjemahkan ke konteks daerah.

Kondisi geografis Indonesia yang luas menyebabkan disparitas capaian mutu antar-provinsi cukup mencolok; provinsi di Jawa pada umumnya lebih maju dibanding wilayah timur, namun tantangan perataan kualitas tetap tinggi—termasuk di Jawa Timur. Publikasi Statistik Pendidikan Jawa Timur 2023 merekam bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ sederajat di provinsi ini baru mencapai 83,86 %, sedangkan APK SMK mencapai 58,43 %, lebih rendah dibanding rata-rata target nasional (BPS Jawa Timur, 2023). Selain itu, survei BPS menunjukkan kesenjangan ketersediaan perangkat TIK di sekolah kabupaten/kota pinggiran sampai 27 poin persentase di bawah kota besar (BPS Jawa Timur, 2023). Ketimpangan tersebut berdampak pada ketidaksiapan sekolah dalam mengintegrasikan platform Learning Management System dan asesmen digital, sehingga upaya pemerataan mutu memerlukan strategi asistensi berlapis (UNESCO, 2024).

Di Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk dan sekolah terbanyak di Indonesia, tantangan tersebut muncul dalam berbagai bentuk. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun angka partisipasi kasar (APK) pendidikan dasar dan menengah di Jawa Timur tergolong tinggi, masih terdapat ketimpangan kualitas antara sekolah di daerah perkotaan dengan daerah pinggiran atau pedesaan. Ketimpangan ini terlihat pada ketersediaan sarana prasarana, akses internet, rasio guru terhadap siswa, serta kemampuan sekolah dalam mengelola sistem pembelajaran berbasis teknologi.

Dalam menjawab tantangan tersebut, BBPMP Jawa Timur telah menginisiasi sejumlah strategi transformasi, seperti pendampingan intensif implementasi Kurikulum Merdeka, pelatihan guru digital, penguatan ekosistem teknologi pembelajaran, hingga pengembangan dashboard mutu pendidikan berbasis *real-time* data. Salah satu praktik baik yang dilakukan adalah kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha dalam menerapkan sistem digitalisasi sekolah. Inovasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi pendidikan tidak hanya bertumpu pada regulasi, tetapi juga pada kemampuan berjejaring dan menciptakan kolaborasi antarpemangku kepentingan di tingkat lokal.

Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur tampil sebagai simpul koordinasi transformasi pendidikan di tingkat provinsi dengan menekankan lima pilar intervensi: penguatan SDM, pendampingan kurikulum, digitalisasi, supervisi berbasis data, dan kolaborasi pendanaan. Melalui seri webinar Transformasi Digital bersama Dinas Pendidikan, BBPMP Jatim mengolaborasikan akun belajar.id dan pelatihan coding serta AI bagi guru SMP-SMA sebagai respons atas kebutuhan kompetensi abad 21. Unit ini juga mengembangkan Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILAT) untuk memudahkan pengaduan publik, serta Rapor Pendidikan provinsi guna memantau kemajuan indikator mutu secara real-time. Pendekatan tersebut selaras dengan amanat Permendikbud 12/2024 tentang penyiapan payung hukum Kurikulum Merdeka secara nasional, yang menitikberatkan dukungan teknis berkelanjutan dari BB/BBPMP (BBPMP Jatim, 2023).

Urgensi pengabdian kepada masyarakat dalam konteks ini terletak pada kebutuhan memperluas jejaring kolaborasi antara kampus, lembaga pemerintah, dan komunitas lokal untuk mengoptimalkan penerapan teknologi pendidikan di sekolah-sekolah sasaran (Darmawan & Putri, 2023). Studi pengabdian di beberapa daerah menunjukkan bahwa pelatihan literasi digital

yang dikemas lewat pendekatan service-learning mampu meningkatkan kesiapan guru menggunakan Learning Management System hingga 35 % dalam kurun tiga bulan (Nugroho & Fatimah, 2021). Riset lain menegaskan pentingnya strategi pendampingan berkelanjutan agar perubahan perilaku pembelajaran digital tidak berhenti saat program selesai. Di Jawa Timur, partisipasi perguruan tinggi melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik digital learning terbukti membantu 47 sekolah menengah menerapkan portal Merdeka Mengajar secara mandiri.

Dengan pendekatan piramida terbalik, dapat disimpulkan bahwa tantangan pendidikan global (akses, mutu, dan relevansi), komitmen nasional dalam transformasi digital, serta kebutuhan spesifik di daerah seperti Jawa Timur menuntut peran strategis lembaga seperti BBPMP untuk bertransformasi menjadi pusat sinergi pendidikan berbasis data, kolaborasi, dan inovasi. Artikel ini akan membahas secara komprehensif bagaimana BBPMP Jawa Timur berperan dalam mendukung transformasi pendidikan serta bagaimana pengabdian kepada masyarakat dapat memperkuat ekosistem pendidikan daerah secara berkelanjutan.

Dengan demikian, peran strategis BBPMP Jawa Timur dalam mendukung transformasi pendidikan tidak hanya terbatas pada fungsi regulasi dan supervisi, tetapi juga sebagai katalis sinergi *triple helix* pemerintah, akademisi, dan masyarakat, untuk memastikan setiap inovasi pembelajaran digital benar-benar memberi dampak bagi peserta didik. Pendekatan piramida terbalik yang berawal dari tantangan global, prioritas nasional, hingga kebutuhan lokal menegaskan bahwa intervensi berbasis bukti di tingkat provinsi merupakan jembatan krusial untuk menutup kesenjangan mutu pendidikan di Indonesia. Artikel ini selanjutnya akan menguraikan peran, strategi, dan praktik baik BBPMP Jawa Timur dalam mengakselerasi agenda transformasi pendidikan seraya memosisikan pengabdian kepada masyarakat sebagai wahana transfer pengetahuan yang berkelanjutan.

Tujuan dari pelaksanaan magang ini adalah untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam dunia kerja di lingkungan instansi pemerintah, khususnya yang relevan dengan profesi di bidang Administrasi Publik. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami teori yang telah dipelajari di bangku kuliah, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara langsung dalam konteks kerja nyata. Magang ini menjadi sarana untuk mengasah kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja dengan mengembangkan penguasaan kompetensi konseptual, teknis, dan relasional sesuai dengan standar harapan instansi pemerintahan. Selain itu, magang ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai proses administrasi kepegawaian yang diterapkan di BBPMP Provinsi Jawa Timur, termasuk di dalamnya proses pengarsipan dokumen, entri data, penyusunan surat dinas, dan manajemen informasi kepegawaian. Melalui keterlibatan langsung, mahasiswa dapat mengidentifikasi permasalahan administratif yang terjadi di lapangan serta merumuskan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Lebih jauh lagi, kegiatan magang ini diharapkan dapat membentuk karakter profesional mahasiswa, meningkatkan kedisiplinan, serta melatih kemampuan kerja tim dan komunikasi antarbagian. Dengan demikian, magang tidak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi juga menjadi bekal strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di dunia birokrasi dan pelayanan publik yang semakin menuntut efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas.

## METODE PELAKSANAAN

Magang ini merupakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertipe participatory job training yang dilaksanakan selama 40 hari kerja (3 Maret – 8 Mei 2025, pukul 08.00–15.00 WIB, Senin–Jumat) di Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur, Jl. Ketintang Wiyata No.15, Surabaya. Populasi kegiatan mencakup seluruh pegawai struktural dan fungsional BBPMP ( $\pm 85$  orang); sampel ditetapkan secara purposive pada 15 petugas kepegawaian kunci dan arsiparis yang paling relevan dengan tugas magang. Data dikumpulkan melalui (1) *participant observation* harian, (2) wawancara semi-terstruktur, (3) studi dokumen SIMPEG & POS, serta (4) lembar logbook aktivitas. Instrumen/alat utama ialah komputer-PC dengan aplikasi SIMPEG versi 4.2, Microsoft Excel 2019, pemindai dokumen ADF 600 dpi, dan alat tulis kantor standar; bahan berupa arsip fisik (SK, daftar hadir, surat dinas) yang diverifikasi menggunakan lembar pengecekan.

Kualitas data dijaga melalui triangulasi sumber & metode, lalu dianalisis secara deskriptif-kualitatif (reduksi–display–verifikasi) dipadukan tabulasi kuantitatif sederhana (frekuensi, persentase) untuk rekap absensi dan volume surat. Hasil disajikan dalam bentuk narasi, tabel, serta bagan alir proses kepegawaian agar mudah dipahami pemangku kepentingan. Dokumentasi temuan diolah menjadi artikel ilmiah menggunakan tahapan penulisan terstruktur sebagaimana bagan alir berikut.



Gambar 1 Bagan Alir Kegiatan PKL

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil

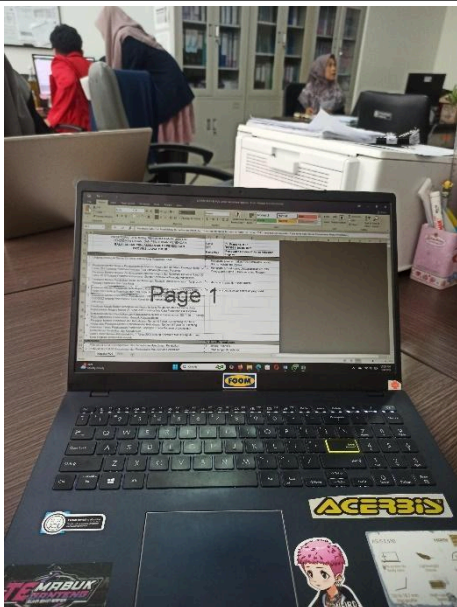
Karakteristik subjek kegiatan PKL di BBPMP Jawa Timur memperlihatkan lingkungan kerja yang cukup representatif sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Unit ini memiliki struktur organisasi yang terorganisir dengan baik, terdiri atas bidang perencanaan, program, evaluasi, serta kepegawaian. Subjek magang, yakni bagian kepegawaian, secara langsung menangani urusan administrasi sumber daya manusia, termasuk pengelolaan arsip, pembaruan data ASN, dan penyusunan surat-surat kedinasan. Mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi dilibatkan secara aktif dalam berbagai kegiatan administratif harian, sehingga pengalaman yang diperoleh bersifat langsung (*hands-on experience*) dan aplikatif.

Pengalaman teknis juga diperoleh saat mahasiswa diberi kesempatan untuk menggunakan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG). Dengan sistem ini, mahasiswa mempelajari alur penginputan dan validasi data pegawai, serta bagaimana data tersebut digunakan untuk menyusun laporan kepegawaian yang dibutuhkan oleh pimpinan. Keberadaan

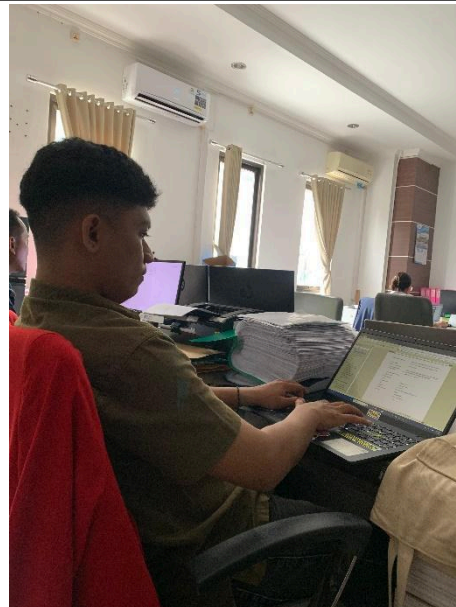
sistem ini menunjukkan bahwa BBPMP Jatim telah mulai beralih ke tata kelola administrasi yang lebih modern dan berbasis data digital.

Selain aspek teknis, mahasiswa juga belajar tentang budaya kerja birokrasi, seperti pelaksanaan briefing pagi, pemantauan kedisiplinan pegawai, serta tata krama komunikasi antarbagian. Dalam lingkungan yang birokratis dan berorientasi pada pelayanan publik, kemampuan beradaptasi terhadap etika kerja dan budaya organisasi menjadi bagian penting dari pembelajaran. Interaksi dengan pegawai senior menjadi sarana bagi mahasiswa untuk belajar bagaimana menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik seperti keadilan, efisiensi, transparansi, dan tanggung jawab. Lebih jauh lagi, kegiatan PKL ini juga mempertemukan mahasiswa dengan tantangan-tantangan nyata di lapangan, seperti keterlambatan input data akibat keterbatasan perangkat, ketidaksesuaian format dokumen antarbagian, hingga proses revisi POS yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap regulasi dan prosedur internal lembaga. Mahasiswa diminta untuk menyusun draf POS baru dengan menyesuaikan pada Permendikbudristek terbaru dan instrumen pengawasan berbasis digital.

Tantangan tersebut berhasil diselesaikan secara kolaboratif melalui diskusi, revisi, serta konsultasi langsung dengan mentor lapangan. Selama pelaksanaan magang, mahasiswa juga berkontribusi dalam menyusun draf dan mengarsipkan surat-surat kedinasan, seperti surat tugas perjalanan dinas, surat izin cuti pegawai, hingga surat keterangan aktif bekerja. Kegiatan ini tidak hanya menuntut kemampuan teknis pengetikan dan format, tetapi juga mengasah ketelitian, kecermatan terhadap aturan penulisan administrasi resmi, serta kemampuan menjalin koordinasi antarbagian. Sebagai bagian dari evaluasi akhir, mahasiswa diminta menyusun laporan kegiatan magang secara komprehensif dan mempresentasikannya di hadapan pembimbing instansi. Presentasi ini menjadi momen reflektif untuk menilai sejauh mana keterlibatan, pemahaman, dan kontribusi yang diberikan selama kegiatan PKL berlangsung. Penilaian yang diberikan mencakup aspek disiplin, partisipasi aktif, kemampuan teknis, inisiatif, dan kemampuan bekerja dalam tim.



Gambar 1 Pengolahan Data Program Strategis di Lingkungan BBPMP Jawa Timur



Gambar 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Pendidikan BBPMP

Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PKL di BBPMP Jawa Timur telah memberikan pengalaman menyeluruh yang mencakup aspek teknis, administratif, kultural, dan profesional, yang sangat relevan dengan dunia kerja birokrasi pemerintahan, khususnya dalam bidang administrasi publik dan manajemen kepegawaian.

#### B. Pembahasan

Karakteristik subjek PKL dapat dibagi ke dalam dua ranah: lingkungan kerja dan jenis tugas kepegawaian. Lingkungan kerja terdiri atas satu unit kepegawaian BBPMP Jawa Timur yang diampu oleh 15 pegawai inti—meliputi arsiparis, verifikator data, dan tenaga administrasi—serta didukung perangkat SIMPEG versi 4.2, pemindai dokumen ADF, dan seperangkat aplikasi perkantoran. Selama 40 hari praktik, mahasiswa ditempatkan sebagai junior clerk yang terlibat langsung dalam lima klaster aktivitas: (1) digitalisasi dan klasifikasi arsip, (2) pemutakhiran data personel di SIMPEG, (3) penyusunan surat kedinasan, (4) rekapitulasi absensi & cuti, serta (5) redesain Prosedur Operasional Standar (POS) kepegawaian. Setiap klaster menuntut kompetensi berbeda; misalnya pengelompokan arsip menitikberatkan akurasi metadata, sedangkan revisi POS menuntut pemahaman regulasi kepegawaian terkini. Output terkumpul berupa 1935 file arsip terdigitasi, 287 entri data baru/terbarui, 43 draf surat kedinasan, tiga laporan rekap bulanan, serta satu dokumen POS kepegawaian hasil pembaruan.

Temuan hasil pelaksanaan magang yang menunjukkan keterlibatan aktif mahasiswa dalam berbagai tugas teknis dan strategis mencerminkan bahwa proses magang tidak hanya bersifat pelengkap kurikulum, tetapi juga sebagai medium penguatan kompetensi inti mahasiswa Administrasi Publik. Keterlibatan dalam input data SIMPEG, penyusunan surat dinas, dan pembaruan POS menunjukkan integrasi langsung antara teori manajemen publik yang dipelajari di kelas dengan praktik lapangan. Hal ini memperkuat konsep *experiential learning* dari Kolb (1984) yang menyatakan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi melalui pengalaman langsung yang kemudian diolah menjadi pengetahuan dan keterampilan baru.

Kehadiran mahasiswa dalam forum harian seperti briefing pagi dan diskusi POS juga memperlihatkan bahwa praktik birokrasi modern semakin terbuka terhadap partisipasi dan transfer pengetahuan dari kalangan akademik. Ini sejalan dengan pendekatan *new public service* yang menempatkan masyarakat (termasuk mahasiswa magang) bukan sebagai objek pasif birokrasi, tetapi sebagai mitra dalam pencapaian tujuan publik. Mahasiswa tidak hanya menjalankan instruksi, tetapi juga memberikan masukan dalam revisi POS kepegawaian—suatu bentuk partisipasi aktif yang menunjukkan internalisasi nilai *co-production* dalam pelayanan publik.

Penggunaan sistem informasi kepegawaian seperti SIMPEG menunjukkan komitmen BBPMP dalam mengadopsi kebijakan *e-government* dan *good governance*, di mana transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi menjadi prinsip utama. Namun, keterbatasan perangkat dan jaringan yang masih ditemui menegaskan bahwa infrastruktur digital masih perlu diperkuat agar transformasi digital dalam birokrasi tidak bersifat setengah jalan. Penelitian Arifin dan Siregar (2022) mengungkap bahwa keberhasilan sistem informasi manajemen kepegawaian sangat bergantung pada pelatihan SDM serta konsistensi penggunaan sistem di seluruh jenjang birokrasi. Oleh karena itu, kehadiran mahasiswa dalam membantu entri dan validasi data juga memberikan dampak positif sebagai bentuk *supporting capacity* jangka pendek.



Selain itu, keterlibatan dalam penyusunan surat resmi dan pengarsipan menunjukkan pentingnya penguasaan kompetensi dasar administrasi pemerintahan. Surat kedinasan bukan sekadar dokumen formal, tetapi merupakan alat komunikasi resmi yang mencerminkan citra dan kinerja lembaga. Kemampuan mahasiswa dalam menyesuaikan diri dengan gaya bahasa, format, dan etika komunikasi birokrasi menjadi indikator kesiapan profesional mereka. Temuan ini mendukung pernyataan Rohman (2010) bahwa pelayanan publik yang baik bukan hanya tentang kecepatan layanan, tetapi juga ketepatan format dan kesesuaian prosedur. Pembelajaran lain yang signifikan adalah proses revisi dan penyusunan POS kepegawaian. Ini merupakan tugas strategis yang biasanya hanya dilakukan oleh pegawai tetap. Fakta bahwa mahasiswa diberikan ruang dalam proses ini menunjukkan adanya transfer kepercayaan dan pengakuan atas potensi akademik yang dibawa mahasiswa. Dalam konteks manajemen publik, hal ini mendukung pendekatan *organizational learning* (Argyris & Schön, 1978), di mana organisasi yang adaptif mampu belajar dari anggota baru atau pihak eksternal untuk memperbaiki proses internalnya.

Dari sisi sikap dan etos kerja, kegiatan magang juga telah menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya ketepatan waktu, komunikasi efektif, serta koordinasi lintas sektor dalam kerja birokrasi. Nilai-nilai ASN seperti integritas, nasionalisme, etika pelayanan publik, dan tanggung jawab, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, secara tidak langsung menjadi pembelajaran karakter bagi mahasiswa selama masa magang. Ini menjadi modal penting bagi mereka yang kelak akan terjun sebagai aparatur sipil negara atau profesional di sektor publik lainnya. Dengan demikian, hasil-hasil magang ini secara umum mendukung berbagai teori administrasi publik kontemporer dan membuktikan bahwa kemitraan antara perguruan tinggi dan lembaga pemerintah seperti BBPMP dapat menciptakan ruang pembelajaran yang adaptif, relevan, dan transformatif bagi mahasiswa maupun instansi. Namun demikian, keberhasilan ini juga menekankan pentingnya perencanaan magang yang sistematis, supervisi yang aktif, serta dukungan lingkungan kerja yang terbuka terhadap inovasi dan partisipasi generasi muda.

Selain aspek teknis dan pembelajaran individual, pelaksanaan magang di BBPMP Jawa Timur turut merefleksikan dinamika transformasi kelembagaan yang tengah berlangsung dalam tubuh instansi pemerintah. Transformasi digital yang diupayakan melalui penggunaan SIMPEG, Rapor Pendidikan, dan sistem pelaporan online lainnya menunjukkan bahwa BBPMP secara aktif merespons arah kebijakan nasional menuju birokrasi berbasis data dan teknologi informasi. Namun, fakta bahwa sebagian pekerjaan administratif seperti entri data dan pengarsipan masih dilakukan secara manual juga menandakan adanya fase transisi yang belum tuntas. Dalam konteks ini, kehadiran mahasiswa sebagai bagian dari generasi digital menjadi katalis yang tidak hanya membantu menyelesaikan pekerjaan administratif, tetapi juga memberi perspektif baru dalam pemanfaatan teknologi secara lebih efektif dan efisien.

Lebih dari itu, magang di lingkungan pemerintahan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menginternalisasi nilai-nilai etika birokrasi yang tidak dapat dipelajari hanya melalui teori. Praktik kerja yang menekankan kedisiplinan waktu, ketelitian dalam pengolahan dokumen resmi, serta tanggung jawab terhadap informasi pegawai memperlihatkan bahwa pelayanan publik berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kecepatan, tetapi juga oleh komitmen terhadap akurasi dan keadilan. Dalam beberapa kesempatan, mahasiswa menghadapi situasi yang menuntut penyelesaian masalah secara langsung, seperti pencocokan data ASN yang tidak sinkron atau penyusunan surat yang memerlukan kejelasan hukum. Pengalaman ini memperkuat



teori administrasi publik modern yang menempatkan integritas dan akuntabilitas sebagai elemen utama dalam praktik birokrasi yang melayani masyarakat secara berkelanjutan.

Di sisi lain, kegiatan ini juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara instansi pemerintah dan institusi pendidikan tinggi sebagai bagian dari penguatan sistem pengabdian kepada masyarakat. Dalam kerangka tridharma perguruan tinggi, magang bukan sekadar wahana praktik, melainkan bentuk konkret dari keterlibatan akademisi dalam proses pembangunan kelembagaan. Kehadiran mahasiswa tidak hanya memberi manfaat bagi individu, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana evaluasi internal instansi. Sebagai contoh, penyusunan ulang POS yang melibatkan mahasiswa dapat berfungsi sebagai audit mini terhadap alur kerja kepegawaian yang selama ini berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kemitraan dapat menciptakan nilai tambah jika dikelola secara strategis dan partisipatif.

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, maka penting bagi lembaga pemerintah seperti BBPMP untuk menjadikan program magang sebagai bagian integral dari strategi pengembangan institusi dan pembinaan SDM. Di sisi lain, perguruan tinggi juga perlu mengadaptasi kurikulumnya agar lebih responsif terhadap kebutuhan riil dunia kerja birokrasi. Pengalaman yang diperoleh dari kegiatan PKL ini menunjukkan bahwa integrasi teori dan praktik, jika difasilitasi secara tepat, tidak hanya akan menghasilkan lulusan yang siap kerja, tetapi juga dapat mempercepat proses reformasi tata kelola pemerintahan, terutama di sektor pendidikan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pelaksanaan praktik kerja lapangan yang dilaksanakan di bagian Kepegawaian Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa kegiatan magang ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam aspek peningkatan kapasitas mahasiswa melalui keterlibatan langsung dalam sistem administrasi publik. Mahasiswa memperoleh pengalaman konkret dalam menjalankan tugas-tugas kepegawaian seperti pengarsipan, entri data SIMPEG, penyusunan surat kedinasan, hingga review dokumen POS, yang secara simultan memperkuat keterampilan teknis dan pemahaman regulatif mereka. Selain itu, magang ini juga berperan dalam pembentukan sikap profesional mahasiswa yang mencerminkan nilai-nilai ASN, seperti tanggung jawab, integritas, dan etika pelayanan publik. Seluruh pengalaman tersebut tidak hanya mendekatkan mahasiswa pada praktik birokrasi yang sesungguhnya, tetapi juga mengukuhkan integrasi antara teori administrasi publik dan implementasinya di lapangan. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar BBPMP terus membuka ruang kolaboratif bagi mahasiswa melalui program magang maupun kegiatan pengabdian lanjutan yang lebih tematik dan berbasis riset. Selain itu, perguruan tinggi perlu memperkuat kurikulum berbasis praktik untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi dinamika kerja birokrasi yang semakin digital dan adaptif. Untuk pengembangan ke depan, kegiatan pengabdian sejenis dapat difokuskan pada peningkatan kompetensi digital ASN, penyempurnaan sistem data kepegawaian berbasis cloud, dan kajian kolaboratif antara akademisi dan instansi pemerintah dalam mendukung reformasi tata kelola pelayanan publik.

## B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil pelaksanaan magang ini mencakup beberapa pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program praktik kerja lapangan. Bagi instansi BBPMP Jawa Timur, diharapkan dapat terus membuka peluang bagi mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam proyek-proyek kepegawaian dan pengembangan sistem administrasi, sehingga pengalaman praktik yang diperoleh dapat lebih bervariasi dan memberi kontribusi positif terhadap kinerja instansi. Bagi mahasiswa, penting untuk mempersiapkan diri secara matang sebelum melaksanakan magang, terutama dalam hal penguasaan perangkat lunak pendukung administrasi dan pemahaman dasar terkait sistem birokrasi pemerintah, serta menjaga sikap profesional selama berada di lingkungan kerja. Sementara itu, bagi perguruan tinggi, disarankan untuk memperkuat jejaring kemitraan dengan lembaga pemerintahan seperti BBPMP melalui skema kerja sama yang berkelanjutan agar mahasiswa memperoleh pengalaman magang yang aplikatif, relevan dengan kurikulum, dan mendukung kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- BBPMP Jatim. (2023). Dokumen Profil dan Kinerja BBPMP Jawa Timur Tahun 2022–2023. Surabaya: BBPMP Provinsi Jawa Timur.
- BPS Jawa Timur. (2023). Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2023. Surabaya: Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- Darmawan, A., & Putri, S. M. (2023). Peran Perguruan Tinggi dalam Mendorong Digitalisasi Pendidikan Melalui PKM. *Jurnal Abdimas Integratif*, 6(1), 33–41.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Permendikbud Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPMP. Jakarta: Kemdikbud.
- Nugroho, S., & Fatimah, L. (2021). Service Learning untuk Peningkatan Literasi Digital Guru di Sekolah Desa. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian*, 5(2), 97–104.
- Republik Indonesia. (2003). Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPMP. Jakarta: Kemdikbud.
- Rohman, H. (2010). *Etika Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- UNESCO. (2024). *SDG 4 Scorecard: Progress towards Quality Education*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- World Bank. (2024). *Digital Progress in Education: Bridging the Global Divide*. Washington, DC: World Bank Group.